



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. kegiatan utama dan indikator yang tercantum dalam Ketentuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
 - b. kegiatan utama dan indikator yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (4) Penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati sesuai dengan wilayah dan kewenangannya.

1. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 April 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

Cap/dto
ANDI HUDIRMAN

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 27

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
 TEKNIS PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT
 HIDUP SEHAT

DAFTAR KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

No	Penanggung Jawab	Tujuan Germas	Kegiatan Utama	Indikator
1	Sekretaris Daerah	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	Koordinasi dan fasilitasi pemerintah daerah dalam Gerakan Pelaksanaan Masyarakat Hidup Sehat	a. Surat Edaran (SE) Bupati untuk mendorong pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah. b. Jumlah Daerah yang menyusun Jumlah daerah yang menyusun kebijakan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
			Mendorong instansi untuk menyediakan sarana Aktivitas Fisik dan Melaksanakan olahraga serta deteksi Dini Penyakit Secara Rutin	a. Jumlah Instansi Pemerintah Yang Mneyediakan Sarana Aktivitas Fisik dan Melaksanakan Olahraga b. Jumlah Instansi Pemerintah
			Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana Ruang ASI, Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta Konsumsi Sayur dan Buah dalam Pertemuan di dalam atau Luar Kantor	a. Jumlah Instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan Sarana Ruang ASI. b. Jumlah Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) c. Jumlah Instansi Pemerintah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau di luar kantor.

2	Dinas Kesehatan	a. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat	a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta Meningkatkan Advokasi dan Pembinaan Daerah dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	a. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat. b. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Kebijakan KTR di Minimal 50% Sekolah
		b. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	b. Penguatan partisipasi Masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui UKBM	a. Persentase Posyandu aktif b. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai dengan NSPK Kesehatan
		c. Peningkatan Aktifitas Fisik	c. Meningkatkan Pendidikan Mengenai Gizi Seimbang dan Pemberian ASI Eksklusif serta Aktifitas Fisik	a. Jumlah Petugas kesehatan yang menjadi Konselor Menyusui b. Jumlah Kampanye kegiatan ASI eksklusif c. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Gemar Ber aktifitas Fisik
		d. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi	d. Meningkatkan Pelaksanaan Deteksi Dini di Puskesmas dan Menyusun Panduan Pelaksanaan Deteksi Dini di Instansi Pemerintah dan Swasta	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.
		e. Peningkatan Kualitas Lingkungan	e. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan menurunkan kebiasaan Buang Air Sembarangan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Bebas Masyarakat (STBM) dan yang Bebas <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	a. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat b. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat c. Peningkatan Kualitas Lingkungan	a. Meningkatkan Kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) b. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah c. Penerapan Sekolah Ramah Anak	- Jumlah Sekolah Memiliki UKS sesuai Standar Pelayanan - Jumlah Sekolah yang menerapkan Kebijakan KTR - Jumlah Sekolah Ramah Anak (Sekolah yang bebas Intimidasi dan Kekerasan)

			<p>d. Meningkatkan Pendidikan Keluarga untuk Hidup Sehat.</p> <p>e. Pembudayaan dan Fasilitasi Kegiatan Aktifitas Fisik di Sekolah</p> <p>f. Penyediaan Sarana Sanitasi sekolah</p>	<p>- Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendidikan Keluarga untuk Hidup sehat</p> <p>- Jumlah Satuan Pendidikan yang Meningkatkan Kegiatan Aktifitas fisik/olahraga di Sekolah</p> <p>- Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah</p>
		d. Peningkatan aktivitas Fisik	<p>a. Meningkatkan Kampanye Gemar Berolahraga</p> <p>b. Fasilitasi Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat</p> <p>c. Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga Masyarakat</p>	<p>a. Jumlah Peserta Olahraga Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata</p> <p>b. Jumlah fasilitasi Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Rekreasi</p> <p>c. Jumlah Fasilitasi sarana Olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi</p> <p>d. Jumlah Fasilitasi Kejuaraan olahraga tradisional dan Layanan Khusus</p>

4	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan edukasi sehat b. Peningkatan perilaku hidup sehat c. Peningkatan aktivitas fisik d. Peningkatan kualitas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan kesehatan pranikah b. Penguatan UKS di madrasah c. Penerapan KTR di madrasah d. Penguatan Pos Kesehatan Pesantren e. Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di madrasah f. Fasilitasi rumah ibadah sehat g. Penyediaan sarana sanitasi di madrasah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah b. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik c. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR d. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren) e. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga f. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah g. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat h. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi
5	Dinas Pangan dan Pertanian	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar b. Meningkatkan Penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat c. Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi pangan keluarga d. Pengembangan Desa Pangan Aman 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif b. Jumlah Desa yang terbina dalam rangka peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat c. Jumlah Desa yang terSosialisasi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga d. Jumlah Desa Aman pangan yang terbina

			<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong Pemnafaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah b. Meningkatkan dan memperluas Pelaksanaan Geran Minum Susu pada masyarakat c. Kampanye Produk Perternakan yang Aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) d. Mengawasi Mutu dan Keamanan Hasil Perternakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah b. Jumlah Konsumsi protein, hewani (daging, susu, telur) masyarakat Kabupaten Bangka c. Jumlah Temuan Penyimpangan kasus produk pangan di lapangan
6	Dinas Perikanan	Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) pada Masyarakat b. Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional b. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) c. Jumlah Lokasi yang diawasi Mutu dan Keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas Lingkungan b. Peningkatan Aktivitas fisik c. Peningkatan Aktivitas Fisik d. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan Pemukiman dan sarana fasilitas umum b. Fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi c. Fasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan d. Edukasi dan Kampanye Pengelolaan sampah dan sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan b. Jumlah Fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum c. Luas ruang terbuka hijau di perkotaan d. Jumlah Kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi

8	Dinas Perhubungan	Peningkatan kualitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai. b. Penghapusan penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil c. Pemanfaatan Bank Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbanginya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Priorotas b. Jumlah Penggunaan Merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (Sarana) Pengolahan Emas non-merkuri c. Jumlah Timbunan Sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh Produsen dan Retail, Pusat Daur Ulang Sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura dan <i>Urban farming</i> kapasitas 0,5 ton/hari
			d. Peningkatan Kemitraan Lingkungan dan Peran serta Masyarakat	d. Jumlah Komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan Lingkungan pada kawasan DAS, Danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.
9.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat b. Penyediaan Pangan Sehat dan percepatan Perbaikan gizi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alkohol b. Promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah dalam negeri c. Fasilitasi Pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Kegiatan Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. b. Jumlah Kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri

		<ul style="list-style-type: none"> c. Peningkatan Pencegahan dan deteksi dini penyakit d. Peninkatan aktivitas fisik e. Penyediaan Pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi f. Peningkatan perilaku hidup sehat 	<ul style="list-style-type: none"> d. Mendorong Kegiatan Olahraga di tempat kerja e. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, Sarana Olahraga dan Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok 	<ul style="list-style-type: none"> c. Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja d. Jumlah Perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga e. Jumlah Perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui f. Jumlah Perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan tanpa rokok di Area Kerja
10	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	<ul style="list-style-type: none"> a. Kajian Peningkatan cukai dan Pajak produk rokok dan minuman beralkohol b. Kajian skema insentif daerah yang melaksanakan Germas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Kajian besaran kenaikan cukai rokok dan Ppn produk rokok dan minuman beralkohol b. Jumlah kajian skema insentif bagi daerah yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup sehat secara optimal
11	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Peningkatan Edukasi Hidup Sehat	<ul style="list-style-type: none"> a. Desimenasi Informasi pola hidup bersih dan Sehat b. Pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Pesan Perilaku Hidup bersih dan Sehat yang mudah dipahami oleh Masyarakat b. Jumlah Kegiatan Kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

12	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat b. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> a. Promosi Pergerakan Perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) b. Meningkatkan komunikasi Informasi dan Edukasi GERMAS bagi Keluarga, Perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM b. Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
13	BPJS Kesehatan	Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit	Pelayanan Promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini Penyakit	Jumlah Pencegahan Sekunder dan pelayanan Promotif dan Preventif dalam paket jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk Upaya Pencegahan Sekunder dan Deteksi Dini Penyakit.
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Aktivitas Fisik b. Peningkatan Kualitas Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Event Olahraga wisata b. Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Event Olahraga sebagai bagian dari tujuan wisata yang diselenggarakan b. Jumlah Fasilitas pengadaan toilet bersih di Tempat Wisata
15	Dinas Sosial	a. Peningkatan Kualitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Rehabilitasi jumlah rumah tidak layak huni bagi keluarga farkir miskin pedesaan b. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga farkir miskin 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosial Keluarga Miskin di Perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi Rumah tidak layak huni (KK) b. Jumlah Kelompok penduduk miskin yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan (Kelompok)

16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Peningkatan Edukasi Hidup Sehat	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisai Germas oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) b. Mendorong Pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung Pelaksanaan Germas di Setiap Desa (seperti setiap kegiatan olah raga, senam bersama di desa, pemanfaatan posbindu, untuk deteksi PTM, Penyediaan air bersih, jamban sehat, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Kegiatan Sosilalisasi Germas oleh pendamping Program Keluarga Harapan b. Jumlah dana Desa yang di gunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap Desa
17.	Dinas Kependudukan dan catatan sipil	Penimngkatan Edukasi Hidup Sehat	Sosialisasi Gemar beraktivitas fisik dan makan Buah	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah partisipasi pegawai beraktivitas fisik b. Persentase pegawai yang makan buah dan sayur c. Persentase pegawai yang mengecek Kesehatan secara berkala d. Persentase peregangan di tempat kerja
18	Badan Narkotika Kabupaten	Peningkatan Edukasi Hidup sehat	Diseminasi Informasi P4GN untuk pelajar / mahasiswa, keluarga, pekerja dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba b. Persentase kawasan atau wilayah rawan narkoba di perkotaan dan pedesaan yang du intervensi program pemberdayaan anti narkoba
19	Rumah Sakit	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	Pelaksanaan kegiatan yang mendukung Germas yang didasarkan pada kebijakan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Pegawai Rumah Sakit yang melaksanakan aktivitas fisik b. Persentase pegawai rumah sakit yang makan buah dan sayur c. Persentase pegawai rumah sakit yang mengecek kesehatan secara berkala

20	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong /penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum d. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah unit satuan rumah yang dilengkapi dengan Prasarana dan sarana Umum pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan b. Aktivitas fisik dalam bentuk lainnya minimal 30 menit c. Jumlah Fasilitas Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum d. Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir dari bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
21	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	Pelaksanaan kegiatan yang mendukung GERMAS yang didasarkan pada kebijakan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pegawai yang melaksanakan Aktivitas Fisik b. Persentase Pegawai yang makan buah dan sayur c. Persentase pegawai yang mengecek kesehatan secara berkala d. Persentase peregangan di tempat kerja
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung GERMAS yang di dasarkan pada kebijakan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pegawai yang melaksanakan Aktivitas Fisik b. Persentase Pegawai yang makan buah dan sayur c. Persentase Pegawai yang mengecek Kesehatan secara berkala d. Persentase Peregangan di tempat kerja

23	Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah (Bappeda)	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. b. Mengukur Indikator Keberhasilan Gerakan masyarakat Sehat	Jumlah Instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Capaian Indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
24.	Dewan Perwakilan Rakyat	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	Mendorong Pelaksanaan GERMAS di Daerah melalui dukungan kebijakan publik Berwawasan Kesehatan	Jumlah Kebijakan di Daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
25	Perguruan Tinggi	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung Program GERMAS	1. Jumlah Publikasi hasil penelitian yang mendukung program gernas 2. Jumlah Desa Binaan yang mendukung program GERMAS 3. Frekuensi Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung Program GERMAS
26	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mendukung GERMAS

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN